



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 108);

19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lumajang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
4. Rencana Penggunaan Dana, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah rencana penggunaan dana berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan sebagai dasar pengajuan ADD pada bulan bersangkutan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lumajang ini.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar setiap kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 4

Alokasi formula yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (Ddkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
- DDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 6

Alokasi formula yang dihitung berdasarkan Indeks kesulitan geografis Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara rutin setiap bulan.
- (2) Besaran jumlah penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.

- (3) Ketentuan teknis mengenai penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan ADD.

Pasal 9

ADD diprioritaskan untuk membiayai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh OPD teknis terkait.

Pasal 10

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Semester I, Semester II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	NO	DESA	ADD MURNI (Dalam ribuan)	ANGGARAN DANA RT/RW (Dalam ribuan)	TAMBAHAN ANGGARAN DANA POSYANDU GERBANG MAS (Dalam ribuan)	ALOKASI DANA DESA (Rp) (Dalam ribuan)
1	TEMPURSARI	1	TEGALREJO	540,262	64,800	10,000	615.062
	TEMPURSARI	2	BULUREJO	523,632	57,600	12,000	593.232
	TEMPURSARI	3	PUROREJO	532,649	96,000	16,000	644.649
	TEMPURSARI	4	TEMPURREJO	518,437	60,000	10,000	588.437
	TEMPURSARI	5	TEMPURSARI	536,622	120,000	22,000	678.622
	TEMPURSARI	6	PUNDUNGSARI	527,369	69,600	10,000	606.969
	TEMPURSARI	7	KALIULING	534,457	105,600	12,000	652.057

2	PRONOJIWO	8	SIDOMULYO	527,468	88,800	14,000	630.268
	PRONOJIWO	9	PRONOJIWO	523,330	132,000	20,000	675.330
	PRONOJIWO	10	TAMANAYU	538,650	91,200	18,000	647.850
	PRONOJIWO	11	SUMBERURIP	520,494	72,000	10,000	602.494
	PRONOJIWO	12	ORO-ORO OMBO	552,766	105,600	14,000	672.366
	PRONOJIWO	13	SUPIT URANG	544,056	52,800	12,000	608.856
3	CANDIPURO	14	JUGOSARI	524,370	105,600	12,000	641.970
	CANDIPURO	15	JARIT	563,269	256,800	20,000	840.069
	CANDIPURO	16	CANDIPURO	548,502	124,800	18,000	691.302
	CANDIPURO	17	SUMBEREJO	531,518	110,400	12,000	653.918
	CANDIPURO	18	SUMBER WULUH	581,928	127,200	22,000	731.128

	CANDIPURO	19	SUMBER MUJUR	576,874	91,200	20,000	688.074
	CANDIPURO	20	PENANGGAL	546,209	112,800	24,000	683.009
	CANDIPURO	21	TAMBAH REJO	530,843	69,600	16,000	616.443
	CANDIPURO	22	KLOPOSAWIT	532,708	96,000	14,000	642.708
	CANDIPURO	23	TUMPENG	539,820	103,200	12,000	655.020
4	PASIRIAN	24	GONDORUSO	570,727	88,800	18,000	677.527
	PASIRIAN	25	KALIBENDO	548,000	112,800	10,000	670.800
	PASIRIAN	26	BADES	587,573	168,000	16,000	771.573
	PASIRIAN	27	BAGO	562,221	132,000	12,000	706.221
	PASIRIAN	28	SELOK AWAR AWAR	553,486	187,200	16,000	756.686
	PASIRIAN	29	CONDRO	510,784	88,800	8,000	607.584
	PASIRIAN	30	MADUREJO	525,145	76,800		611.945

						10,000	
	PASIRIAN	31	PASIRIAN	555,682	201,600	12,000	769.282
	PASIRIAN	32	SEMEMU	550,692	120,000	16,000	686.692
	PASIRIAN	33	NGUTER	555,033	196,800	18,000	769.833
	PASIRIAN	34	SELOK ANYAR	559,480	93,600	10,000	663.080
5	TEMPEH	35	PANDANWANGI	557,299	180,000	12,000	749.299
	TEMPEH	36	SUMBERJATI	531,793	76,800	12,000	620.593
	TEMPEH	37	TEMPEH KIDUL	557,563	93,600	18,000	669.163
	TEMPEH	38	LEMPENI	559,514	160,800	14,000	734.314
	TEMPEH	39	TEMPEH TENGAH	530,499	148,800	16,000	695.299
	TEMPEH	40	KALIWUNGU	551,761	124,800	12,000	688.561
	TEMPEH	41	TEMPEH LOR	530,930	201,600		752.530

						20,000	
	TEMPEH	42	BESUK	531,035	62,400	10,000	603.435
	TEMPEH	43	JATISARI	517,225	62,400	10,000	589.625
	TEMPEH	44	PULO	532,399	177,600	20,000	729.999
	TEMPEH	45	GESANG	518,431	127,200	10,000	655.631
	TEMPEH	46	JOKARTO	532,984	117,600	10,000	660.584
	TEMPEH	47	PANDAN ARUM	545,591	141,600	14,000	701.191
6	KUNIR	48	JATIMULYO	553,602	81,600	10,000	645.202
	KUNIR	49	JATIREJO	536,141	88,800	8,000	632.941
	KUNIR	50	JATIGONO	533,984	129,600	12,000	675.584
	KUNIR	51	SUKOREJO	534,807	100,800	8,000	643.607
	KUNIR	52	SUKOSARI	552,035	110,400		670.435

						8,000	
	KUNIR	53	KUNIR KIDUL	550,635	124,800	20,000	695.435
	KUNIR	54	KUNIR LOR	531,510	88,800	16,000	636.310
	KUNIR	55	KEDUNG MORO	522,263	117,600	8,000	647.863
	KUNIR	56	KARANGLO	542,476	91,200	12,000	645.676
	KUNIR	57	KABUARAN	518,043	55,200	8,000	581.243
	KUNIR	58	DOROGOWOK	518,966	108,000	10,000	636.966
7	YOSOWILANGUN	59	DARUNGAN	529,729	91,200	12,000	632.929
	YOSOWILANGUN	60	KRATON	510,325	88,800	8,000	607.125
	YOSOWILANGUN	61	WOTGALIH	560,089	134,400	14,000	708.489
	YOSOWILANGUN	62	TUNJUNGREJO	509,755	62,400	6,000	578.155
	YOSOWILANGUN	63	YOSOWILANGUN KIDUL	540,343	129,600		691.943

						22,000	
	YOSOWILANGUN	64	YOSOWILANGUN LOR	532,735	141,600	24,000	698.335
	YOSOWILANGUN	65	KRAI	532,867	100,800	16,000	649.667
	YOSOWILANGUN	66	KARANGANYAR	519,524	45,600	6,000	571.124
	YOSOWILANGUN	67	KARANGREJO	515,994	52,800	8,000	576.794
	YOSOWILANGUN	68	MUNDER	523,642	105,600	12,000	641.242
	YOSOWILANGUN	69	KEBONSARI	532,345	45,600	10,000	587.945
	YOSOWILANGUN	70	KALIPEPE	520,106	122,400	12,000	654.506
8	ROWOKANGKUNG	71	NOGOSARI	513,705	55,200	12,000	580.905
	ROWOKANGKUNG	72	KEDUNGREJO	520,594	57,600	6,000	584.194
	ROWOKANGKUNG	73	SIDOREJO	520,521	110,400	16,000	646.921
	ROWOKANGKUNG	74	ROWOKANGKUNG	618,733	134,400		773.133

						20,000	
	ROWOKANGKUNG	75	SUMBERSARI	527,511	52,800	10,000	590.311
	ROWOKANGKUNG	76	DAWUHAN WETAN	575,168	141,600	20,000	736.768
	ROWOKANGKUNG	77	SUMBERANYAR	533,911	57,600	8,000	599.511
9	TEKUNG	78	WONOGRIYO	523,557	88,800	8,000	620.357
	TEKUNG	79	WONOSARI	526,671	57,600	8,000	592.271
	TEKUNG	80	MANGUNSARI	517,310	48,000	8,000	573.310
	TEKUNG	81	TEKUNG	522,972	86,400	8,000	617.372
	TEKUNG	82	WONOKERTO	517,348	67,200	8,000	592.548
	TEKUNG	83	TUKUM	528,479	177,600	18,000	724.079
	TEKUNG	84	KARANGBENDO	523,308	110,400	12,000	645.708
	TEKUNG	85	KLAMPOKARUM	508,092	36,000		548.092

						4,000	
10	LUMAJANG	86	BANJARWARU	507,043	57,600	8,000	572.643
	LUMAJANG	87	LABRUK LOR	513,033	57,600	8,000	578.633
	LUMAJANG	88	DENOK	528,509	88,800	10,000	627.309
	LUMAJANG	89	BLUKON	509,613	36,000	6,000	551.613
	LUMAJANG	90	BORENG	546,134	112,800	18,000	676.934
11	PASRUJAMBE	91	PASRUJAMBE	552,181	240,000	22,000	814.181
	PASRUJAMBE	92	JAMBEKUMBU	537,424	127,200	10,000	674.624
	PASRUJAMBE	93	SUKOREJO	537,111	115,200	8,000	660.311
	PASRUJAMBE	94	JAMBEARUM	531,156	120,000	10,000	661.156
	PASRUJAMBE	95	KERTOSARI	523,760	81,600	10,000	615.360
	PASRUJAMBE	96	PAGOWAN	527,048	112,800		647.848

						8,000	
	PASRUJAMBE	97	KARANGANOM	534,367	120,000	12,000	666.367
12	SENDURO	98	PURWOREJO	521,424	105,600	12,000	639.024
	SENDURO	99	SARIKEMUNING	512,284	81,600	8,000	601.884
	SENDURO	100	PANDANSARI	538,236	110,400	10,000	658.636
	SENDURO	101	SENDURO	518,021	189,600	10,000	717.621
	SENDURO	102	BURNO	522,928	96,000	12,000	630.928
	SENDURO	103	KANDANGTEPUS	542,105	230,400	18,000	790.505
	SENDURO	104	KANDANGAN	526,556	88,800	14,000	629.356
	SENDURO	105	BEDAYU	519,791	79,200	6,000	604.991
	SENDURO	106	BEDAYUTALANG	524,520	43,200	8,000	575.720
	SENDURO	107	WONOCEPOKOAYU	524,545	98,400		630.945

						8,000	
	SENDURO	108	ARGOSARI	530,083	72,000	8,000	610.083
	SENDURO	109	RANUPANI	514,920	21,600	4,000	540.520
13	GUCIALIT	110	WONOKERTO	525,375	69,600	10,000	604.975
	GUCIALIT	111	PAKEL	523,129	43,200	6,000	572.329
	GUCIALIT	112	KENONGO	516,191	48,000	8,000	572.191
	GUCIALIT	113	GUCIALIT	536,557	100,800	12,000	649.357
	GUCIALIT	114	DADAPAN	555,344	168,000	18,000	741.344
	GUCIALIT	115	KERTOWONO	557,221	110,400	20,000	687.621
	GUCIALIT	116	TUNJUNG	529,789	57,600	10,000	597.389
	GUCIALIT	117	JERUK	521,674	45,600	12,000	579.274
	GUCIALIT	118	SOMBO	526,558	38,400		568.958

						4,000	
14	PADANG	119	BARAT	584,458	172,800	14,000	771.258
	PADANG	120	BABAKAN	520,830	72,000	8,000	600.830
	PADANG	121	MOJO	531,732	105,600	8,000	645.332
	PADANG	122	BODANG	581,286	158,400	14,000	753.686
	PADANG	123	KEDAWUNG	542,755	105,600	12,000	660.355
	PADANG	124	PADANG	516,265	60,000	6,000	582.265
	PADANG	125	KALISEMUT	557,077	81,600	10,000	648.677
	PADANG	126	MERAKAN	551,751	84,000	8,000	643.751
	PADANG	127	TANGGUNG	514,573	76,800	8,000	599.373
15	SUKODONO	128	KLANTING	513,674	74,400	10,000	598.074
	SUKODONO	129	KEBONAGUNG	517,055	50,400		573.455

						6,000	
	SUKODONO	130	KARANGSARI	526,124	134,400	12,000	672.524
	SUKODONO	131	DAWUHAN LOR	527,667	163,200	16,000	706.867
	SUKODONO	132	KUTORENON	515,317	175,200	16,000	706.517
	SUKODONO	133	SELOKBESUKI	518,379	96,000	10,000	624.379
	SUKODONO	134	SUMBEREJO	529,721	127,200	12,000	668.921
	SUKODONO	135	URANGGANTUNG	517,851	60,000	6,000	583.851
	SUKODONO	136	SELOKGONDANG	539,044	144,000	12,000	695.044
	SUKODONO	137	BONDOYUDO	527,394	72,000	6,000	605.394
16	KEDUNGJAJANG	138	PANDANSARI	516,001	57,600	6,000	579.601
	KEDUNGJAJANG	139	KRASAK	542,183	98,400	10,000	650.583
	KEDUNGJAJANG	140	KEDUNGJAJANG	518,250	62,400		588.650

						8,000	
	KEDUNGJAJANG	141	WONOREJO	528,092	146,400	20,000	694.492
	KEDUNGJAJANG	142	UMBUL	537,668	69,600	10,000	617.268
	KEDUNGJAJANG	143	CURAHPETUNG	547,319	96,000	12,000	655.319
	KEDUNGJAJANG	144	GROBOGAN	548,897	124,800	12,000	685.697
	KEDUNGJAJANG	145	BENCE	528,251	52,800	6,000	587.051
	KEDUNGJAJANG	146	JATISARI	524,920	76,800	4,000	605.720
	KEDUNGJAJANG	147	TEMPURSARI	549,577	100,800	8,000	658.377
	KEDUNGJAJANG	148	BANDARAN	524,835	24,000	4,000	552.835
	KEDUNGJAJANG	149	SAWARAN KULON	557,907	60,000	8,000	625.907
17	JATIROTO	150	BANYUPUTIH KIDUL	520,946	86,400	10,000	617.346
	JATIROTO	151	ROJOPOLO	560,249	124,800		701.049

						16,000	
	JATIROTO	152	KALIBOTO KIDUL	566,667	139,200	24,000	729.867
	JATIROTO	153	KALIBOTO LOR	574,553	223,200	38,000	835.753
	JATIROTO	154	SUKOSARI	553,302	67,200	12,000	632.502
	JATIROTO	155	JATIROTO	548,007	189,600	28,000	765.607
18	RANDUAGUNG	156	BANYUPUTIH LOR	540,661	132,000	14,000	686.661
	RANDUAGUNG	157	KALIDILEM	576,184	136,800	18,000	730.984
	RANDUAGUNG	158	TUNJUNG	550,130	117,600	14,000	681.730
	RANDUAGUNG	159	GEDANGMAS	525,078	165,600	14,000	704.678
	RANDUAGUNG	160	KALIPENGGUNG	596,106	177,600	30,000	803.706
	RANDUAGUNG	161	RANULOGONG	540,321	124,800	12,000	677.121
	RANDUAGUNG	162	RANDUAGUNG	540,088	144,000		698.088

						14,000	
	RANDUAGUNG	163	LEDOKTEMPURO	525,726	103,200	14,000	642.926
	RANDUAGUNG	164	PAJARAKAN	534,164	76,800	8,000	618.964
	RANDUAGUNG	165	BUWEK	524,497	60,000	8,000	592.497
	RANDUAGUNG	166	RANUWURUNG	549,378	134,400	14,000	697.778
	RANDUAGUNG	167	SALAK	562,444	86,400	12,000	660.844
19	KLAKAH	168	KEBONAN	529,386	72,000	8,000	609.386
	KLAKAH	169	KUDUS	525,465	69,600	8,000	603.065
	KLAKAH	170	DUREN	529,565	64,800	8,000	602.365
	KLAKAH	171	SUMBERWRINGIN	536,873	67,200	8,000	612.073
	KLAKAH	172	PAPRINGAN	528,654	45,600	8,000	582.254
	KLAKAH	173	RANUPAKIS	559,343	81,600		650.943

						10,000	
	KLAKAH	174	TEGALRANDU	538,575	81,600	10,000	630.175
	KLAKAH	175	KLAKAH	536,711	134,400	20,000	691.111
	KLAKAH	176	MLAWANG	531,575	96,000	18,000	645.575
	KLAKAH	177	SRUNI	542,182	64,800	8,000	614.982
	KLAKAH	178	TEGALCIUT	539,154	86,400	10,000	635.554
	KLAKAH	179	SAWARAN LOR	541,122	76,800	8,000	625.922
20	RANUYOSO	180	JENGGRONG	596,408	105,600	14,000	716.008
	RANUYOSO	181	MENINJO	531,506	48,000	8,000	587.506
	RANUYOSO	182	TEGALBANGSRI	511,933	38,400	6,000	556.333
	RANUYOSO	183	SUMBERPETUNG	555,719	72,000	8,000	635.719
	RANUYOSO	184	ALUN-ALUN	552,672	43,200		605.872

						10,000	
	RANUYOSO	185	RANUBEDALI	565,624	120,000	14,000	699.624
	RANUYOSO	186	RANUYOSO	532,224	100,800	12,000	645.024
	RANUYOSO	187	WONOAYU	530,696	69,600	10,000	610.296
	RANUYOSO	188	PENAWUNGAN	578,498	52,800	8,000	639.298
	RANUYOSO	189	WATES KULON	529,458	96,000	10,000	635.458
	RANUYOSO	190	WATES WETAN	521,223	81,600	10,000	612.823
21	SUMBERSUKO	191	SUMBERSUKO	515,474	124,800	16,000	656.274
	SUMBERSUKO	192	KEBONSARI	519,409	124,800	12,000	656.209
	SUMBERSUKO	193	GRATI	517,000	67,200	6,000	590.200
	SUMBERSUKO	194	LABRUK KIDUL	518,975	160,800	12,000	691.775
	SUMBERSUKO	195	MOJOSARI	524,898	112,800	12,000	649.698

	SUMBERSUKO	196	SENTUL	514,632	81,600	8,000	604.232
	SUMBERSUKO	197	PURWOSONO	518,646	86,400	8,000	613.046
	SUMBERSUKO	198	PETAHUNAN	503,152	43,200	6,000	552.352
JUMLAH TOTAL				106,128,612	19,965,600	2,374,000	128,468,212

BUPATI LUMAJANG,

Drs. H. AS'AT, M.Ag

